

BANGUN SISTEM KEAMANAN LAUT

Yusril: Perlu Penguatan Regulasi

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kumham Imipias) Yusril Ihza Mahendra memaparkan sejumlah rekomendasi untuk membangun sistem keamanan laut yang komprehensif.

"Kita perlu melakukan hal-hal berkaitan dengan membangun sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif. Kami merekomendasikan beberapa hal," kata Yusril di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/2).

Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipias Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus.

Yusril menyebut hal pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. "Mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan

nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan," ucapnya.

Ia juga menyebut perlunya menetapkan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut (*coast guard*) Indonesia yang mempunyai kewenangan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut.

Selanjutnya, ia mengatakan diperlukan alat pendukung (*supporting*) investasi canggih mencakup teknologi informasi, komunikasi dan infrastrukturnya. Kemudian, lanjut Yusril, perlunya penguatan anggaran pembangunan sistem pengawasan keamanan laut yang lebih modern dan efektif. Termasuk, peningkatan kerja sama internasional dalam pengamanan laut.

"Keenan, efisiensi dan efektivitas birokrasi termasuk pencegahan, pemeriksaan berulang-ulang dan

penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan," tutur Yusril.

Terakhir, perlunya peran masyarakat maupun sektor swasta terlibat dalam menjaga keamanan laut. Termasuk integrasi masyarakat terhadap keamanan di laut.

Di awal, Yusril memberikan sejumlah rekomendasi di atas berangkat dari empat isu strategis sistem keamanan laut yang menjadi fokus perhatian, yakni urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut lantaran banyaknya regulasi yang tumpang tindih.

Kemudian, konsolidasi kelembagaan yang diperlukan pula untuk efisiensi dalam menegakkan hukum di laut. Selanjutnya, masalah kolaborasi antara instansi dan peningkatan infrastruktur keamanan di laut.

Sementara itu, Komisi I DPR menekankan urgensi keberadaan instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut demi meminimalkan potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal di laut. "Urgensi instansi tunggal yang bertanggung

jawab atas keamanan laut sangat diperlukan guna mengeliminir potensi kerugian yang dialami negara akibat aktivitas ilegal di laut," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin jalannya rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kumham Imipias) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipias Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus.

Ia menyebut saat ini ada lebih dari enam instansi yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam keamanan laut dan penegakan hukum di laut, seperti TNI Angkatan Laut (AL) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Untuk itu Indonesia perlu memiliki instansi kuat mungkin juga instansinya tunggal seperti di negara lain yang bertugas sebagai *coast guard*.

(Ant/Obi)-d

SINAU SEJARAH DI SMA NEGERI 2 BANTUL Asal-usul Berdirinya Kraton Yogya



KR-Wawan Isnawan

Widihasto Wasana Putra di situs Perjanjian Giyanti.

YOGYA (KR) - Merujuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK), Keistimewaan DIY berdasarkan sejarah dan asal-usulnya, sehingga semua rangkaian sejarah Yogyakarta menjadi pondasi Keistimewaan DIY.

Salah satunya adalah sejarah Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 yang menjadi cikal bakal berdirinya Kraton Ngayogyakarta. Sejarah asal-usul ini perlu diinformasikan kepada masyarakat luas, tidak terkecuali kalangan pelajar.

"Salah satu metode pendekatannya adalah mengajak pelajar mengeksplorasi lingkungan dan atau hal-hal sekitar sebagai pintu masuk untuk memperbesar minat mempelajari sejarah. Semisal diajak menelusuri sejarah toponim kampung, mengeksplorasi sejarah adat istiadat, dan lainnya," kata Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra.

Lebih lanjut dikatakan,

materi pelajaran sejarah, khususnya tentang asal-usul Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat perlu didudukkan secara terstruktur dan sistematis pada kalangan pelajar.

"Semisal pada tingkat dasar bersifat pengenalan pengetahuan umum. Di tingkat menengah diarahkan kunjungan lapangan dan di level atas ditingkatkan pada kajian analisis, studi pustaka, penyusunan karya tulis, membuat video pendek, dan lainnya," katanya.

Sedangkan pembelajaran sejarah di sekolah seharusnya mengikuti teknologi yang berkembang. "Generasi Z dan generasi Alpha adalah generasi yang lahir di mana teknologi digital menjadi bagian integral kehidupan manusia," kata Widihasto.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pembelajaran guru harus memanfaatkan berbagai kemudahan teknologi digital berikut berbagai pilihan platform yang ada sebagai sarana

penunjang pendidikan.

Untuk menginformasikan sejarah dan asal-usul Keistimewaan DIY, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY mengadakan kegiatan Sinau Sejarah Keistimewaan DIY di sejumlah SMA.

Sinau Sejarah kali ini akan digelar Kamis (13/2) pukul 10.00 - 12.00 di SMA Negeri 2, Jalan RA Kartini, Bantul, bertepatan dengan 270 tahun Perjanjian Giyanti. Sinau Sejarah yang didanai dengan dana keistimewaan (danais) ini disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Menurut Widihasto yang juga penulis naskah video sejarah, Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 ini diperingati karena merupakan periode penting dalam perjalanan sejarah Kraton Mataram yang dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan antara Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi. Kraton Mataram di sisi timur menjadi wilayah Kasunanan Surakarta dan di sisi barat atau yang sekarang dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah Kasultanan Yogyakarta.

Perjanjian Giyanti, lanjut Widihasto, juga menjadi tonggak awal kemunculan berdirinya dinasti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, karena sebulan setelah Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi meneguhkan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. (Wan)

BIKIN GADUH DI RUANG SIDANG

Razman Nasution Dilaporkan ke Bareskrim

JAKARTA (KR) - Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melaporkan pengacara Razman Nasution ke Bareskrim Polri terkait kegaduhan dalam ruang sidang yang terjadi pada Kamis (6/2). Laporan yang diajukan oleh Ketua PN Jakut Ibrahim Palino, tersebut telah diterima dengan laporan polisi dengan nomor LP/B/70/II/2025/SP-

KT/BARESKRIM POLRI.

"Atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin yang menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," kata Humas PN Jakut Maryono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/2).

Selain Razman, PN Jakut

juga melaporkan beberapa orang lainnya. Akan tetapi, Maryono tidak mengungkapkan nama-nama pihak terlapor lainnya. "Kita belum bisa menghitung karena tidak tahu jumlahnya juga. Akan tetapi, sudah setidaknya-tidaknya lebih dari dua," ucapnya.

Menurut Maryono, peristiwa yang dilaporkan adalah kegaduhan yang terjadi di

dalam ruang sidang antara Razman Nasution dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 KUHP terkait penghinaan badan hukum, dan Pasal 217 KUHP terkait membuat gaduh di ruang sidang. Lalu, barang bukti yang diserahkan berupa

rekaman video saat kegaduhan terjadi.

"(Barang bukti, red.) sudah kami serahkan ke penyidik. Karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Tinggal penyidik nanti akan menindaklanjuti

bagaimana," ujarnya.

Maryono menambahkan, laporan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Mahkamah Agung (MA) yang menginstruksikan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. "Jadi, atas

kejadian itu, kami juga tidak tinggal diam. Kami, kan, punya bapak, punya pengadilan tinggi. Kita ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi, ada strata perintah," tegasnya. (Ant/Has)-f

BERI KEMUDAHAN PERJALANAN IBADAH

BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) berkolaborasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam gelaran Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2025. Acara yang berlangsung pada 7 s.d 9 Februari 2025 di Mall Kota Kasablanka Jakarta dan Mall Panakukang Makassar ini menghadirkan berbagai promo menarik bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan Umrah.

Sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan layanan terbaik bagi calon jemaah Umrah, BRI dan Garuda Indonesia resmi menjalin kerja sama yang ditandai dengan seremoni pada 7 Februari 2025 di Kota Kasablanka, Jakarta. Kolaborasi strategis ini bertujuan memberikan kemudahan transaksi serta berbagai keuntungan bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan ibadah.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menyatakan bahwa BRI terus berupaya dalam memberikan layanan perbankan terbaik, termasuk dalam mendukung kebutuhan perjalanan ibadah. "Melalui Garuda Indonesia Umrah Travel Fair 2025, kami ingin memberikan akses lebih mudah serta berbagai keuntungan bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan Umrah," ujar Andrijanto.

Untuk memastikan kelancaran transaksi selama di Tanah Suci, BRI pun telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi serta sejumlah bank terkemuka seperti Alrajhi Bank, Albilad Bank, dan Saudi National Bank (SNB), yang memung-



KR - Istimewa

BRI Gandeng Garuda Indonesia Gelar Umrah Travel Fair 2025, Buka Peluang Perjalanan Ibadah Nyaman.

kinkan nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit BRI dengan mudah.

Kemudahan ini pun makin diperkuat dengan kehadiran BRImo Super Apps, yang memberikan akses layanan digital bagi peserta Umrah. Melalui fitur transfer internasional, jemaah dapat melakukan transaksi ke rekening luar negeri dengan lebih praktis dan aman.

"Lewat sinergi dengan mitra perbankan global, kami berkomitmen untuk memastikan kenyamanan nasabah BRI dalam bertransaksi selama perjalanan ibadah mereka," ucap Andrijanto.

Tak hanya itu, sebagai bagian dari upaya memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam transaksi lintas negara,

BRI juga menghadirkan layanan Debit BRI Multicurrency. Fitur ini mendukung transaksi 12 mata uang asing (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, AED, SAR, HKD, JPY, THB, MYR) dalam satu kartu, Debit BRI berlogo Mastercard. Cukup menghubungkan rekening valas dengan Debit BRI melalui BRImo, nasabah dapat bertransaksi di berbagai negara tanpa biaya konversi kurs.

Debit BRI juga menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi rencana ibadah Umrah, sebab Debit BRI dilengkapi dengan teknologi contactless untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang efisien bagi nasabah. Hanya perlu tap Debit BRI di EDC, pembayaran jadi semakin cepat, mudah, dan nyaman.

Lebih lanjut, selama gelaran GUTF 2025 berlangsung, terdapat sejumlah promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah BRI, diantaranya Cashback Up to Rp5 juta dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu, di booth BRI, pengunjung dapat mengikuti kegiatan seru berhadiah smartphone, logam mulia, dan saldo BRImo. Dengan berbagai promo ini, BRI berharap masyarakat dapat melaksanakan ibadah Umrah dengan biaya yang lebih efisien dan terjangkau.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan pun menjelaskan penyelenggaraan GUTF ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam mengoptimalkan potensi pangsa umrah Indonesia yang terus



KR - Istimewa

Konferensi pers Gelaran Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2025.



KR - Istimewa

Gelaran Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2025. Acara yang berlangsung pada 7 s.d 9 Februari 2025 di Mall Kota Kasablanka Jakarta dan Mall Panakukang Makassar.

bertumbuh. Pasalnya, jumlah jemaah umrah asal Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Kemenag.go.id, hingga September 2024 jumlah jemaah umrah Indonesia hampir mencapai 2 juta orang. Angka ini naik dari tahun 2023 yang hanya tercatat sebanyak 1,22

juta jemaah (data SISKOPATUH Kemenag).

"Melalui jangkauan gelaran GUTF yang semakin luas, diharapkan masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih beragam dalam memperoleh paket perjalanan umrah yang semakin kompetitif dengan berbagai nilai tambah yang ditawarkan," jelas Wamildan. (*)